

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di Provinsi Banten

(Implementation of Inclusive Education Policies in Efforts to Promote Educational Equity in Banten Province)

Jumanah ^{1,*}, Arif Nugroho ², Dine Trio Ratnasari ³

^{1,2} Institut Kemandirian Nusantara, Banten, Indonesia

³ Universitas Setiabudhi Rangkasbitung, Banten, Indonesia

¹ jumanah1011@gmail.com *; ² arifnugroho090187@gmail.com ; ³ dinetrio@gmail.com

* corresponding author : Jumanah

ARTICLE INFO

Article history:

Received : April 21, 2026

Revised : April 25, 2026

Accepted : April 27, 2026

Kata Kunci:

Implementasi kebijakan;

Pendidikan inklusif;

Pemerataan Pendidikan;

Keywords :

Policy implementation;

Inclusive education;

Equitable education;



This is an open access article under the CC-BY-SA license. Copyright (c) 2026
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

ABSTRACT

Permasalahan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Banten adalah masih terbatasnya akses dan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, ketimpangan sarana dan prasarana antar wilayah, serta rendahnya kesiapan sumber daya manusia, khususnya guru dalam menerapkan pembelajaran inklusif. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi implementasi kebijakan pendidikan inklusif sebagai upaya strategis untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Banten telah berjalan namun belum optimal. Beberapa sekolah telah menerapkan praktik inklusif, namun masih terdapat kendala seperti kurangnya pelatihan guru, keterbatasan fasilitas pendukung, serta minimnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, ditemukan adanya disparitas implementasi antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas guru, peningkatan dukungan anggaran, serta sinergi kebijakan lintas sektor guna mewujudkan pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di Provinsi Banten.

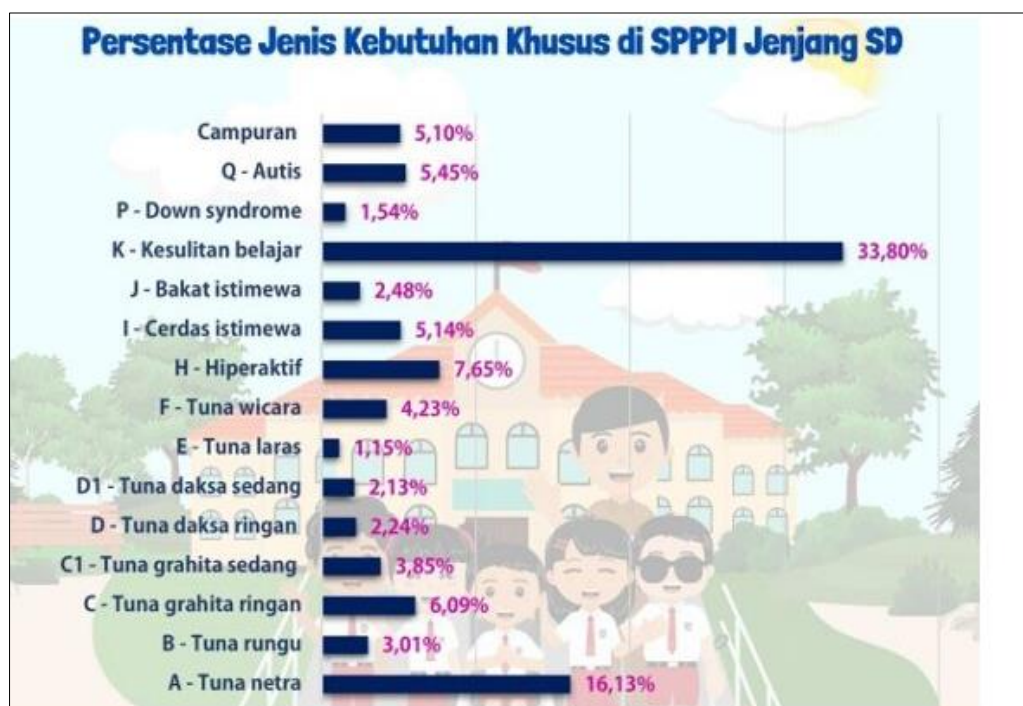
Abstract

The main issues in the implementation of inclusive education policies in Banten Province are the limited access and quality of educational services for students with special needs, the disparity in facilities and infrastructure between regions, and the low readiness of human resources, particularly teachers, in applying inclusive learning. This condition impacts the suboptimal equitable distribution of education. The urgency of this research lies in the importance of evaluating the implementation of inclusive education policies as a strategic effort to guaranty the right to education for all citizens without discrimination, while also supporting the achievement of inclusive and sustainable education development goals. This research uses a qualitative approach with a case study method in several regencies/cities in Banten Province. Data collection techniques were carried out thru in-depth interviews, observations, and document studies, involving stakeholders such as the education office, school principals, teachers, and parents. Data analysis was conducted descriptively using an interactive model. The research results indicate that the implementation of inclusive education policies in Banten Province has been underway but is not yet optimal. Some schools have implemented inclusive practices, but there are still obstacles such as a lack of teacher training, limited supporting facilities, and minimal coordination between institutions. In addition, disparities in implementation between regions have been found. Therefore, it is necessary to strengthen teacher capacity, increase budget support, and create cross-sector policy synergies to achieve inclusive and equitable education in Banten Province.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya pemenuhan hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang adil dan tanpa diskriminasi (Aksela, 2025; Bracco et al., 2024; Park & Kwon, 2024). Prinsip ini sejalan dengan amanat konstitusi serta berbagai regulasi nasional yang menegaskan bahwa setiap individu, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Dalam konteks global, pendidikan inklusif juga menjadi bagian dari komitmen terhadap agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam menjamin akses pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas bagi semua (Karimatunisa & Muhtarom, 2024).

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan inklusif menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan (Antariksa et al., 2022; Darodjat dan Wahyudhiana M, 2015; Yuningsih, 2019). Pendidikan inklusif menekankan pada penyelenggaraan pendidikan yang mampu mengakomodasi seluruh peserta didik dalam satu sistem yang setara, tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun emosional. Namun demikian, implementasi kebijakan ini di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Banten, masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks (Anwar et al., 2025). Secara umum, perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia menunjukkan tren positif. Data nasional mencatat bahwa hingga Desember 2022 terdapat sekitar 40.928 sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus mencapai 135.946 siswa (Fitrah et al., 2024). Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan layanan, khususnya di tingkat daerah. Di Provinsi Banten sendiri, implementasi pendidikan inklusif masih tergolong terbatas. Data Balai Penyelenggara Pendidikan Khusus (BPPK) menunjukkan bahwa baru sekitar 85 Sekolah Dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, jumlah yang relatif kecil jika dibandingkan dengan total kebutuhan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.



Sumber: Media Online, 2026

Infografik tersebut menampilkan persentase jenis kebutuhan khusus pada peserta didik jenjang SD (SPPPI). Data ini menggambarkan variasi karakteristik siswa berkebutuhan khusus serta proporsi masing-masing kategori. Secara umum, kategori dengan persentase tertinggi adalah K – Kesulitan belajar sebesar 33,80%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya, yang menunjukkan bahwa mayoritas siswa berkebutuhan khusus di jenjang SD mengalami hambatan dalam proses belajar, seperti kesulitan membaca, menulis, atau berhitung. Di posisi berikutnya terdapat A – Tuna netra sebesar

16,13%, yang menunjukkan proporsi cukup signifikan dari siswa dengan gangguan penglihatan. Selanjutnya, kategori H – Hiperaktif sebesar 7,65% juga cukup dominan, mencerminkan adanya kebutuhan perhatian khusus dalam pengelolaan perilaku dan konsentrasi siswa di kelas. Dari keseluruhan data, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan khusus pada jenjang SD sangat beragam, namun didominasi oleh masalah kesulitan belajar. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pendidikan inklusif perlu lebih difokuskan pada penguatan strategi pembelajaran adaptif, peningkatan kompetensi guru dalam menangani kesulitan belajar, serta penyediaan layanan pendukung yang sesuai dengan karakteristik siswa. Selain itu, keberagaman jenis kebutuhan khusus ini juga menuntut sistem pendidikan yang fleksibel dan responsif agar mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan peserta didik secara optimal (Jumanah et al., 2025).

Provinsi Banten sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat menghadapi tantangan kompleks dalam mewujudkan pemerataan Pendidikan (Ira Nazliyah, 2024). Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan masih terlihat, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Selain itu, keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus yang tersebar di berbagai kabupaten/kota menuntut adanya sistem pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap keragaman kebutuhan belajar (Abdullah, 2025; Eden, 2018; Fitriah et al., 2024).

Tabel 1. Eksisting Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten

No	Nama Kota/Kabupaten	Jumlah PD	PD Valid ***)	Siswa Valid Berkebutuhan Khusus	Ketunaan Tunggal *)			Ketunaan Ganda **)		
					Total	Memenuhi Klasifikasi	Tidak Memenuhi Klasifikasi	Total	Memenuhi Klasifikasi	Tidak Memenuhi Klasifikasi
1	Kab. Pandeglang	269.632	257.604	1.340	1.285	663	622	55	0	55
2	Kab. Lebak	280.556	270.754	1.619	1.576	415	1.161	43	1	42
3	Kab. Tangerang	631.160	609.996	1.780	1.636	818	818	144	2	142
4	Kab. Serang	341.857	328.644	644	609	279	330	35	1	34
5	Kota Cilegon	90.880	89.466	660	621	273	348	39	0	39
6	Kota Tangerang	317.563	313.346	1.401	1.352	621	731	49	0	49
7	Kota Serang	139.845	136.574	676	649	331	318	27	0	27
8	Kota Tangerang Selatan	259.783	254.250	1.463	1.389	339	1.050	74	1	73
TOTAL SEMUA		2.331.276	2.260.634	9.583	9.117	3.739	5.378	466	5	461

Sumber: BPS Provinsi Bante, 2025

Data menunjukkan bahwa jumlah siswa berkebutuhan khusus di Banten cukup signifikan, namun belum seluruhnya memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan prinsip inklusivitas (Mulyah & Khoiri, 2023). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan implementasi di lapangan. Kebijakan pendidikan inklusif pada dasarnya bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dalam sistem pendidikan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk belajar bersama dalam lingkungan yang sama (Astenia et al., 2020; Wu et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini seringkali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam menangani kebutuhan khusus, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep inklusivitas. Di Provinsi Banten, tantangan tersebut diperparah dengan disparitas kapasitas kelembagaan antar daerah, yang berdampak pada belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan inklusif secara merata (Amelia & Azizah, 2023).

Lebih lanjut, persoalan klasifikasi dan identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus juga menjadi isu krusial dalam implementasi kebijakan ini. Ketepatan dalam mengidentifikasi kebutuhan peserta didik sangat menentukan jenis layanan pendidikan yang diberikan (Mustika Yanti et al., 2023; Nasrulloh & Ismail, 2018; Suardipa & Pitriani, 2020). Namun, masih ditemukan kasus di mana peserta didik belum terklasifikasi dengan baik, sehingga berpotensi tidak mendapatkan intervensi pendidikan yang tepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pendataan dan asesmen masih memerlukan penguatan, baik dari

sisi regulasi maupun kapasitas teknis di tingkat satuan pendidikan (Farhan Alfikri, Nyayu Khidjah, 2022). Permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses layanan pendidikan khusus dan inklusif. Hingga saat ini, jumlah Sekolah Khusus (SKh) negeri di Provinsi Banten hanya sekitar 8 unit, sehingga belum mampu menjangkau seluruh wilayah kabupaten/kota secara optimal). Kondisi ini menyebabkan sebagian besar anak berkebutuhan khusus harus mengandalkan sekolah swasta yang kapasitas dan kualitas layanannya beragam, bahkan tidak sedikit yang akhirnya tidak memperoleh layanan pendidikan yang memadai. Pemerintah daerah sendiri telah merencanakan pembangunan tambahan sekolah khusus, namun hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan layanan masih jauh lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan fasilitas yang ada (Jumanah et al., 2025).

Selain keterbatasan infrastruktur, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya partisipasi anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif. Data sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus di Banten mencapai sekitar 5.000 anak, namun yang terlayani dalam sistem pendidikan inklusif belum mencapai 1.000 anak. Kesenjangan ini mengindikasikan masih adanya hambatan dalam proses identifikasi, aksesibilitas, serta penerimaan terhadap pendidikan inklusif di masyarakat. Permasalahan juga terlihat pada aspek kualitas layanan pendidikan. Secara nasional, meskipun terdapat lebih dari 40 ribu sekolah yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus, hanya sekitar 14,83% yang memiliki guru pembimbing khusus. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar satuan pendidikan belum memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk memberikan layanan pendidikan inklusif secara optimal. Di tingkat daerah seperti Banten, keterbatasan kompetensi guru, minimnya pelatihan khusus, serta kurangnya dukungan fasilitas pembelajaran menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan ini (Anjani et al., 2023; Farawita, 2024; Kogoya & Uruwaya, 2022; Nugraha, 2020; Suteja, 2024).

Di sisi lain, berdasarkan publikasi Statistik Pendidikan Provinsi Banten 2025, masih terdapat variasi tingkat partisipasi pendidikan dan capaian pendidikan antar wilayah di Banten yang menunjukkan adanya ketimpangan akses pendidikan. Ketimpangan ini semakin memperbesar tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif secara merata, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendidikan. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Banten belum berjalan optimal. Terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan kondisi empiris di lapangan, baik dari segi akses, kualitas layanan, maupun pemerataan distribusi fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Banten, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta merumuskan strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, penting untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Banten.

Kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek kebijakan, tetapi juga pada praktik di lapangan, termasuk kesiapan sumber daya, mekanisme pelaksanaan, serta dampaknya terhadap akses dan kualitas pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat implementasi kebijakan pendidikan inklusif sebagai upaya nyata dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Provinsi Banten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif (Patton, 2002; Steven J. Taylor, Robert Bogdan, 2016) analitis untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam upaya pemerataan pendidikan di Provinsi Banten. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena secara komprehensif berdasarkan perspektif para pelaku kebijakan serta kondisi empiris di lapangan. Penelitian dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota yang merepresentasikan karakteristik wilayah perkotaan dan perdesaan, seperti Kota Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang, dengan pemilihan lokasi secara purposive guna memperoleh variasi data yang relevan. Waktu penelitian berlangsung dalam rentang sekitar tiga hingga enam bulan, mencakup tahap pengumpulan hingga analisis data.

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif, seperti pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, guru kelas dan guru pembimbing khusus (GPK), orang tua peserta didik berkebutuhan khusus, serta pihak terkait lainnya. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen kebijakan, laporan resmi, data statistik pendidikan, dan literatur ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali informasi terkait implementasi kebijakan, observasi untuk melihat kondisi nyata di lapangan, serta studi dokumentasi untuk melengkapi data pendukung.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Matthew B Miles, Michael Huberman, 2014), dengan dukungan perangkat lunak NVivo untuk membantu proses pengkodean, pengelompokan tema, serta visualisasi hubungan antar konsep. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, serta dilakukan member check dan peer debriefing guna memastikan validitas dan kredibilitas temuan. Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan pendidikan inklusif di tingkat sekolah dan pemerintah daerah di Provinsi Banten, dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan akses data. Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif serta kontribusinya dalam mewujudkan pemerataan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Kebijakan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten



Gambar 2. Payung Hukum Pendidikan Inklusif

Sumber: Analisis Peneliti, 2026

Gambar tersebut memuat kerangka regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, yang menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Diawali dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954, yang menegaskan bahwa anak-anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan melalui berbagai bentuk sekolah luar biasa (SLB), seperti SLB-A untuk tuna netra, SLB-B untuk tuna rungu-wicara, SLB-C untuk tuna grahita, SLB-D untuk tuna daksa, SLB-E untuk tuna laras, dan SLB-G untuk tuna ganda. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bab IV Pasal 5 ayat 1 dan 2) memperkuat prinsip kesetaraan dengan menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, serta secara khusus menegaskan bahwa individu dengan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus (Munaroh, 2024).

Komitmen tersebut kemudian diperjelas melalui kebijakan teknis, seperti Surat Edaran Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 yang mendorong setiap kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan menetapkan minimal empat sekolah inklusi pada setiap jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK). Kebijakan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendidikan segregatif menuju pendidikan yang lebih inklusif dan terintegrasi. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang

disabilitas memberikan panduan teknis terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif, termasuk penyediaan fasilitas, aksesibilitas, serta dukungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa regulasi pendidikan inklusif di Indonesia telah berkembang secara bertahap, mulai dari pendekatan berbasis pemisahan hingga menuju sistem pendidikan yang inklusif, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan di berbagai aspek (Frank & Taylor, 2024; M et al., 2024; Munaroh, 2024; Rizki et al., 2024).

Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954, pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kelainan fisik dan mental sebenarnya sudah terjamin secara hukum. Jaminan itu diberikan dalam bentuk sekolah bagi anak-anak penyandang disabilitas yang diakomodir oleh berbagai macam sekolah luar biasa. SLB-A untuk tunanetra, SLB-B bagi tunarungu-wicara, SLB-C untuk tunagrahita, SLB-D untuk tunadaksa, SLB-E untuk tunalaras, SLB-G untuk tunaganda. Untuk mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mencakup hak-hak penyandang disabilitas, yakni dalam Bab IV Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Selanjutnya melalui surat edaran (Kemendiknas, 2010: 6) Dirjen Dikdasmen, Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 20 Januari 2003 disebutkan: Setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari: SD, SMP, SMA, SMK. Yang terbaru, pada 20 Februari 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Peraturan Pelaksana tersebut merupakan wujud amanat pasal 42 ayat 8 dan pasal 43 ayat 2 dan 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, mengenai kewajiban penyelenggara pendidikan (sekolah dan universitas) dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Peraturan tersebut memuat panduan teknis penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di berbagai jenjang serta jenis pendidikan. Ada pula tata cara penyediaan fasilitas dan aksesibilitas dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Penyediaan akomodasi bagi peserta didik disabilitas tidak disamaratakan, melainkan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ragam disabilitasnya. Pasal-pasal yang diatur di dalam PP Nomor 13 Tahun 2020 ini dapat dijadikan pedoman dasar penyelenggaraan serta penyediaan aksesibilitas bagi sekolah berbasis pendidikan inklusif.

B. Kondisi Eksisting Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten

Dari sisi **sebaran wilayah**, implementasi pendidikan inklusif belum merata antar kabupaten/kota. Data sebelumnya menunjukkan bahwa wilayah seperti Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon memiliki jumlah sekolah inklusi yang relatif lebih banyak dibandingkan daerah lain, sementara beberapa wilayah seperti Kota Tangerang dan Kabupaten Serang masih memiliki jumlah yang sangat terbatas. Ketimpangan ini mencerminkan adanya disparitas kapasitas daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif, baik dari segi sumber daya, komitmen kebijakan, maupun dukungan infrastruktur. Kondisi ini berdampak pada masih terbatasnya akses peserta didik berkebutuhan khusus di wilayah tertentu, terutama di daerah perdesaan atau wilayah dengan tingkat pembangunan pendidikan yang lebih rendah (DiCicco & Faulkner, 2024; Wu et al., 2024).

Sementara itu, dari aspek **jumlah dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus**, data menunjukkan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus di Provinsi Banten diperkirakan mencapai sekitar **5.000 anak**, namun yang telah terlayani dalam sistem pendidikan inklusif masih kurang dari **1.000 anak**. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anak berkebutuhan khusus belum mendapatkan akses pendidikan yang sesuai. Dari sisi karakteristik, peserta didik berkebutuhan khusus di Banten sangat beragam, mulai dari kesulitan belajar, autisme, tuna netra, tuna rungu, hingga kebutuhan khusus lainnya. Namun, dominasi kategori kesulitan belajar menunjukkan bahwa kebutuhan layanan pendidikan lebih banyak berkaitan dengan adaptasi kurikulum dan metode pembelajaran dibandingkan dengan kebutuhan fasilitas fisik semata.

Selain itu, kondisi eksisting juga menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah inklusi masih menghadapi keterbatasan dalam hal **sarana prasarana, tenaga pendidik, dan sistem pendukung**

pembelajaran. Banyak sekolah yang telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi, namun belum memiliki guru pembimbing khusus (GPK) yang memadai, serta belum didukung oleh fasilitas pembelajaran yang ramah disabilitas. Hal ini berdampak pada belum optimalnya layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga tujuan pendidikan inklusif untuk memberikan layanan yang setara dan berkualitas belum sepenuhnya tercapai. Secara keseluruhan, kondisi eksisting pendidikan inklusif di Provinsi Banten menunjukkan adanya **kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.** Meskipun telah terdapat upaya pengembangan sekolah inklusi dan peningkatan jumlah peserta didik yang terlayani, namun keterbatasan jumlah sekolah, ketimpangan distribusi wilayah, serta rendahnya cakupan layanan bagi anak berkebutuhan khusus menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan strategi implementasi yang lebih terarah untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan di Provinsi Banten.

Tabel 2. Kondisi Eksisting Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten

No	Aspek yang Dikaji	Indikator	Data/Temuan	Keterangan
1	Jumlah Sekolah Inklusi	SD penyelenggara inklusi	± 85 SD	Masih terbatas dibanding total SD di Banten
		SMA/SMK inklusi	± 22 sekolah	Tersebar di beberapa kab/kota
2	Proporsi Sekolah	Perbandingan dengan total sekolah	Sangat kecil	Belum mencerminkan pemerataan layanan
3	Sebaran Wilayah	Wilayah dengan sekolah inklusi lebih banyak	Kab. Pandeglang, Kota Cilegon	Relatif lebih berkembang
		Wilayah dengan sekolah inklusi terbatas	Kota Tangerang, Kab. Serang	Akses masih rendah
4	Jumlah ABK	Total anak berkebutuhan khusus	± 5.000 anak	Estimasi jumlah keseluruhan
		ABK terlayani di sekolah inklusi	< 1.000 anak	Cakupan layanan masih rendah
5	Karakteristik ABK	Jenis kebutuhan khusus	Kesulitan belajar, autisme, tuna netra, tuna rungu, dll	Sangat beragam
		Dominasi jenis	Kesulitan belajar	Membutuhkan adaptasi pembelajaran
6	Sarana dan Prasarana	Ketersediaan fasilitas inklusif	Belum memadai	Banyak sekolah belum ramah disabilitas
7	Tenaga Pendidik	Guru Pembimbing Khusus (GPK)	Terbatas	Tidak semua sekolah memiliki GPK
8	Sistem Pendukung	Layanan pembelajaran inklusif	Belum optimal	Kurikulum dan metode belum sepenuhnya adaptif
9	Kesenjangan Implementasi	Gap kebijakan vs praktik	Masih tinggi	Implementasi belum merata
10	Dampak	Akses pendidikan ABK	Masih terbatas	Pemerataan belum tercapai

Sumber: Temuan Lapangan, 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi eksisting pendidikan inklusif di Provinsi Banten masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama pada jumlah sekolah inklusi, distribusi wilayah, serta cakupan layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Meskipun kebijakan telah tersedia, implementasinya belum sepenuhnya mampu menjamin pemerataan pendidikan secara optimal.

C. Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan Inklusif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses dan pemerataan layanan pendidikan inklusif di Provinsi Banten masih belum optimal dan cenderung timpang antar wilayah. Secara umum, kebijakan pendidikan inklusif telah mendorong peningkatan jumlah sekolah penyelenggara inklusi, namun jangkauannya belum merata, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Data menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan dasar terdapat sekitar 85 Sekolah Dasar (SD) penyelenggara pendidikan inklusif, sementara pada jenjang menengah terdapat sekitar 22 SMA/SMK inklusi. Jika dibandingkan dengan total jumlah satuan pendidikan di Provinsi Banten yang mencapai ribuan sekolah, proporsi ini masih sangat kecil, sehingga belum mampu menjangkau seluruh peserta didik berkebutuhan khusus secara luas.

Ketimpangan akses juga terlihat jelas dari distribusi geografis sekolah inklusi. Wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang dan Kota Serang cenderung memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, namun tidak selalu memiliki jumlah sekolah inklusi yang memadai. Sementara itu, beberapa wilayah seperti Kabupaten Pandeglang dan Lebak yang memiliki karakteristik wilayah perdesaan dan tingkat pembangunan yang relatif lebih rendah, justru menghadapi keterbatasan yang lebih besar dalam penyediaan layanan pendidikan inklusif. Aksesibilitas menjadi kendala utama, di mana jarak tempuh yang jauh, keterbatasan transportasi, serta minimnya fasilitas pendukung membuat banyak anak berkebutuhan khusus tidak dapat mengakses sekolah inklusi (Coutet, 2022; Ebekozién & Aigbavboa, 2022; McIntyre & Gilbert, 2021).

Selain itu, faktor ketersediaan sumber daya juga turut memengaruhi pemerataan layanan. Sekolah di wilayah perkotaan relatif lebih siap dari segi sarana prasarana dan tenaga pendidik, meskipun masih belum ideal. Sebaliknya, di wilayah perdesaan, banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas ramah disabilitas, seperti akses kursi roda, alat bantu belajar, maupun ruang layanan khusus. Keterbatasan guru pembimbing khusus (GPK) juga menjadi hambatan signifikan, di mana sebagian besar sekolah inklusi belum memiliki tenaga pendidik yang kompeten dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.

Tabel 2. Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten

No	Aspek	Indikator	Data/Temuan	Analisis
1	Ketersediaan Sekolah Inklusi	SD inklusi	± 85 sekolah	Jumlah masih sangat terbatas dibanding total SD
		SMA/SMK inklusi	± 22 sekolah	Belum menjangkau seluruh wilayah
		Proporsi terhadap total sekolah	Sangat kecil	Akses layanan belum merata
2	Cakupan Peserta Didik	Jumlah ABK	± 5.000 anak	Kebutuhan layanan tinggi
		ABK terlayani	< 1.000 anak	Cakupan layanan rendah
		Persentase keterlayanan	< 20%	> 80% belum terlayani
3	Distribusi Wilayah	Wilayah perkotaan	Kota Tangerang, Kota Serang	Fasilitas lebih lengkap, namun belum merata jumlah sekolah inklusi
		Wilayah perdesaan	Kab. Pandeglang, Lebak	Akses sangat terbatas
		Ketimpangan wilayah	Tinggi	Disparitas antar daerah signifikan
4	Aksesibilitas	Jarak tempuh	Relatif jauh (wilayah desa)	Menjadi hambatan utama
		Transportasi	Terbatas	Menghambat mobilitas ABK
		Fasilitas pendukung	Minim	Menurunkan akses layanan

5	Sarana & Prasarana	Fasilitas inklusif	Belum memadai	Banyak sekolah belum ramah disabilitas
		Akses fisik (kursi roda, dll)	Terbatas	Menghambat partisipasi ABK
6	Sumber Daya Manusia	Guru Pembimbing Khusus (GPK)	Terbatas	Tidak semua sekolah memiliki GPK
		Kompetensi guru	Belum merata	Pembelajaran belum optimal
7	Kesenjangan Layanan	Perkotaan vs perdesaan	Tinggi	Perbedaan akses dan kualitas layanan
		Ketersediaan sekolah	Tidak merata	Konsentrasi di wilayah tertentu
8	Dampak	Akses pendidikan ABK	Rendah	Banyak ABK belum terlayani
		Pemerataan pendidikan	Belum tercapai	Kebijakan belum efektif sepenuhnya
9	Kebutuhan Strategis	Pemerataan sekolah inklusi	Sangat diperlukan	Untuk memperluas akses
		Peningkatan SDM	Mendesak	Untuk meningkatkan kualitas layanan
		Penyediaan fasilitas	Prioritas	Mendukung pendidikan inklusif

Sumber: Analisis Peneliti, 2026

Tabel tersebut menunjukkan bahwa akses dan pemerataan pendidikan inklusif di Provinsi Banten masih menghadapi kesenjangan yang cukup signifikan, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Keterbatasan jumlah sekolah inklusi, rendahnya cakupan layanan bagi anak berkebutuhan khusus, serta minimnya fasilitas dan tenaga pendidik menjadi faktor utama yang menghambat tercapainya pemerataan pendidikan secara optimal. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Banten belum sepenuhnya berhasil dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan. Masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara wilayah perkotaan dan perdesaan, baik dari segi ketersediaan sekolah, akses peserta didik, maupun kualitas layanan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada masih perlu diperkuat melalui strategi yang lebih terarah, seperti pemerataan distribusi sekolah inklusi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas yang lebih inklusif di seluruh wilayah.

D. Kesiapan Satuan Pendidikan dalam Implementasi Inklusif

Tabel 3. Kesiapan Satuan Pendidikan dalam Implementasi Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten

No	Aspek	Indikator	Data/Temuan	Kondisi	Analisis
1	Sarana dan Prasarana	Akses fisik (ramp, toilet disabilitas, ruang layanan)	< 50% sekolah memiliki	Belum memadai	Fasilitas dasar belum terpenuhi
		Alat bantu pembelajaran (media visual, alat bantu dengar)	Sangat terbatas	Kurang	Menghambat proses belajar ABK
		Perbedaan wilayah	Perkotaan > Perdesaan	Tidak merata	Disparitas infrastruktur tinggi
2	Kurikulum Adaptif	Implementasi kurikulum modifikasi	± 30-40% sekolah	Rendah	Mayoritas masih kurikulum reguler

		Penerapan IEP (Individualized Education Program)	Terbatas	Belum optimal	Kurang pemahaman teknis guru
		Diferensiasi pembelajaran	Sebagian kecil	Kurang	Pembelajaran belum inklusif
3	Lingkungan Belajar Inklusif	Penerimaan sosial siswa	± 60% sekolah	Cukup berkembang	Interaksi sosial mulai terbentuk
		Praktik non-diskriminasi	Ada namun belum merata	Belum optimal	Masih ada marginalisasi terselubung
		Budaya inklusif sekolah	Belum kuat	Lemah	Masih terdapat stigma
4	Tenaga Pendidik	Ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK)	Sebagian besar belum ada	Sangat terbatas	Peran digantikan guru umum
		Kompetensi guru inklusif	Belum merata	Rendah	Kurang pelatihan dan pendampingan
5	Kesenjangan Wilayah	Perkotaan vs Perdesaan	Tinggi	Tidak merata	Akses dan kualitas berbeda
6	Dampak Implementasi	Kualitas layanan pendidikan inklusif	Belum optimal	Rendah	Kebutuhan ABK belum terpenuhi
7	Kebutuhan Penguatan	Sarana prasarana	Sangat diperlukan	Prioritas	Untuk mendukung aksesibilitas
		Pelatihan guru	Mendesak	Penting	Meningkatkan kompetensi
		Penguatan budaya inklusif	Diperlukan	Strategis	Mengurangi stigma

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kesiapan satuan pendidikan dalam implementasi pendidikan inklusif di Provinsi Banten masih berada pada tingkat yang belum optimal. Keterbatasan fasilitas, rendahnya penerapan kurikulum adaptif, serta belum terbentuknya lingkungan belajar yang sepenuhnya inklusif menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif di Provinsi Banten masih berada pada kategori belum optimal, baik dari aspek sarana dan prasarana, kurikulum adaptif, maupun lingkungan belajar inklusif. Secara umum, meskipun sejumlah sekolah telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi, tingkat kesiapan antar sekolah masih sangat bervariasi dan cenderung dipengaruhi oleh lokasi wilayah (perkotaan vs perdesaan) serta ketersediaan sumber daya. Secara keseluruhan, kesiapan satuan pendidikan dalam implementasi pendidikan inklusif di Provinsi Banten masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Keterbatasan fasilitas fisik, belum optimalnya penerapan kurikulum adaptif, serta belum terbentuknya lingkungan belajar yang sepenuhnya inklusif menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih terarah, seperti peningkatan investasi pada sarana prasarana, pelatihan intensif bagi guru, serta penguatan budaya sekolah inklusif agar implementasi pendidikan inklusif dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

E. Kompetensi dan Peran Guru dalam Pendidikan Inklusif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan peran guru merupakan determinan utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif, namun pada praktiknya di Provinsi Banten masih menghadapi berbagai keterbatasan. Dari aspek kapasitas profesional, mayoritas guru di sekolah inklusi belum memiliki kompetensi khusus dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus (ABK). Data penelitian menunjukkan bahwa hanya sekitar 30–35% guru yang pernah mengikuti pelatihan pendidikan inklusif, baik dalam bentuk workshop, diklat, maupun bimbingan teknis.

Sementara itu, sekitar 65–70% guru belum mendapatkan pelatihan formal, sehingga pemahaman mereka terhadap strategi pembelajaran inklusif masih terbatas pada pengetahuan umum.

Tabel 4. Kompetensi dan Peran Guru dalam Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten

No	Aspek	Indikator	Data/Temuan	Kondisi	Analisis
1	Kapabilitas Profesional	Guru yang pernah mengikuti pelatihan inklusif	± 30–35%	Rendah	Kompetensi khusus masih terbatas
		Guru tanpa pelatihan formal	± 65–70%	Tinggi	Pemahaman masih umum
2	Pengalaman Mengajar	Guru dengan pengalaman menangani ABK	Ada, namun terbatas	Belum optimal	Learning by doing tanpa dasar kuat
		Penerapan pembelajaran adaptif	± 25–30% guru	Rendah	Kurang implementasi diferensiasi
		Penggunaan IEP	Terbatas	Belum maksimal	Minim pemahaman teknis
3	Metode Pembelajaran	Pembelajaran konvensional	Mayoritas guru	Dominan	Kurang responsif terhadap kebutuhan ABK
4	Guru Pembimbing Khusus (GPK)	Sekolah tanpa GPK tetap	> 60% sekolah	Tinggi	Kekurangan tenaga ahli
		Peran GPK (jika tersedia)	Asesmen, IEP, pendampingan	Sangat penting	Meningkatkan kualitas layanan
5	Kolaborasi	Sekolah dengan kolaborasi aktif (guru–GPK orang tua)	± 40% sekolah	Rendah	Koordinasi belum optimal
		Keterlibatan orang tua	Terbatas	Kurang	Intervensi tidak berkelanjutan
6	Sikap dan Persepsi Guru	Guru yang mendukung pendidikan inklusif	± 65%	Cukup baik	Penerimaan sudah berkembang
		Guru yang belum siap	± 35%	Masih signifikan	Kendala kompetensi dan beban kerja
7	Dampak	Kualitas layanan pendidikan inklusif	Belum optimal	Rendah	Dipengaruhi kompetensi guru
8	Kebutuhan Penguatan	Pelatihan berkelanjutan	Sangat diperlukan	Prioritas	Meningkatkan kapasitas guru
		Penambahan GPK	Mendesak	Penting	Mendukung implementasi
		Penguatan kolaborasi	Diperlukan	Strategis	Meningkatkan efektivitas layanan

Sumber: Analisis Peneliti, 2026

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kompetensi dan peran guru dalam pendidikan inklusif di Provinsi Banten masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal pelatihan, pengalaman pembelajaran adaptif, serta ketersediaan guru pembimbing khusus (GPK). Kondisi ini berdampak langsung pada belum optimalnya kualitas layanan pendidikan inklusif dan menjadi salah satu faktor utama penghambat pemerataan pendidikan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan peran guru dalam pendidikan inklusif di Provinsi Banten masih belum optimal dan menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pemerataan layanan pendidikan. Keterbatasan

pelatihan, rendahnya pengalaman dalam pembelajaran adaptif, serta minimnya ketersediaan guru pembimbing khusus menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang lebih terarah, seperti peningkatan pelatihan berkelanjutan bagi guru, penempatan GPK di setiap sekolah inklusi, serta penguatan sistem kolaborasi antara guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya agar pendidikan inklusif dapat berjalan secara optimal dan berkontribusi nyata terhadap pemerataan pendidikan di Provinsi Banten.

F. Hambatan dan Tantangan Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Banten masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang berdampak langsung pada belum optimalnya pemerataan pendidikan. Tiga kendala utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan sumber daya, masih kuatnya stigma sosial, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Ketiga faktor ini saling berkelindan dan memperkuat satu sama lain, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dari aspek keterbatasan sumber daya, penelitian menemukan bahwa sebagian besar satuan pendidikan belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif secara optimal. Data menunjukkan bahwa kurang dari 50% sekolah inklusi memiliki sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, seperti ramp, toilet khusus, dan alat bantu pembelajaran. Selain itu, keterbatasan tenaga pendidik profesional juga menjadi kendala signifikan. Sekitar 60% sekolah inklusi belum memiliki guru pembimbing khusus (GPK) secara tetap, sehingga layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) seringkali ditangani oleh guru reguler yang belum memiliki kompetensi khusus. Dari sisi kapasitas guru, hanya sekitar 30–35% yang pernah mengikuti pelatihan pendidikan inklusif, sehingga sebagian besar guru masih mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran adaptif. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat, di mana alokasi dana untuk pengembangan pendidikan inklusif masih belum menjadi prioritas di sebagian daerah.

Selanjutnya, dari aspek stigma sosial, penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap peserta didik berkebutuhan khusus masih menjadi tantangan serius. Meskipun terdapat perkembangan positif, sekitar 50% lingkungan masyarakat masih menunjukkan sikap ambivalen, dan bahkan sebagian masih memiliki stigma negatif terhadap ABK. Stigma ini tidak hanya terjadi di masyarakat umum, tetapi juga di lingkungan sekolah. Sekitar 30–40% guru dan warga sekolah masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap konsep pendidikan inklusif, yang berdampak pada munculnya perlakuan diskriminatif secara tidak langsung, seperti pengelompokan siswa atau rendahnya ekspektasi terhadap kemampuan ABK. Selain itu, stigma juga memengaruhi keterlibatan orang tua, di mana sekitar 60% orang tua belum aktif terlibat dalam pendidikan anak karena faktor rasa malu, kurangnya pemahaman, atau tekanan sosial. Kondisi ini berdampak pada rendahnya dukungan sosial dan psikologis bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Dari sisi koordinasi antar pemangku kepentingan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif masih berjalan secara sektoral dan belum terintegrasi secara optimal. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 35–45% program pendidikan inklusif yang melibatkan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Koordinasi antar instansi seperti dinas pendidikan, dinas sosial, dan lembaga layanan disabilitas masih lemah, yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih program dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, sistem komunikasi dan pertukaran data antar lembaga belum berjalan secara efektif, sehingga perencanaan dan pengambilan keputusan seringkali tidak berbasis data yang akurat. Di tingkat sekolah, koordinasi internal juga belum optimal, terutama dalam kolaborasi antara guru kelas dan guru pembimbing khusus (GPK).

Tabel 5. Hambatan dan Tantangan Implementasi Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten

No	Aspek Hambatan	Indikator	Data/Temuan	Permasalahan Utama	Dampak
1	Keterbatasan Sumber Daya	Sarana & prasarana	< 50% sekolah memiliki fasilitas ramah disabilitas	Infrastruktur belum memadai	Layanan pendidikan tidak optimal

		Tenaga pendidik (GPK)	± 60% sekolah belum memiliki GPK tetap	Kekurangan tenaga profesional	Pendampingan ABK tidak maksimal
		Kompetensi guru	± 30–35% guru pernah pelatihan inklusif	Rendahnya kapasitas pembelajaran adaptif	Pembelajaran tidak sesuai kebutuhan ABK
		Anggaran	Alokasi belum prioritas di beberapa daerah	Keterbatasan pembiayaan	Pengembangan program terhambat
2	Stigma Sosial	Persepsi masyarakat	± 50% masih ambivalen terhadap ABK	Stigma dan diskriminasi	Penerimaan sosial belum optimal
		Pemahaman guru & sekolah	± 30–40% pemahaman masih terbatas	Kurangnya literasi inklusif	Perlakuan diskriminatif terselubung
		Keterlibatan orang tua	± 60% belum aktif terlibat	Faktor ekonomi & sosial	Dukungan pendidikan tidak berkelanjutan
3	Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan	Kolaborasi program	± 35–45% program melibatkan kolaborasi aktif	Sinergi lintas sektor rendah	Program tidak efektif
		Integrasi kelembagaan	Koordinasi antar dinas belum optimal	Ego sektoral	Program tumpang tindih
		Sistem data & komunikasi	Belum terintegrasi secara sistematis	Data tidak sinkron	Kebijakan tidak berbasis data
		Koordinasi internal sekolah	Belum optimal antara guru & GPK	Kurang kolaborasi internal	Layanan pendidikan tidak maksimal
4	Dampak Implementasi	Akses pendidikan	Banyak ABK belum terlayani	Kesenjangan layanan	Pemerataan belum tercapai
		Kualitas layanan	Rendah	Sistem belum optimal	Hasil belajar kurang maksimal
		Efektivitas kebijakan	Belum optimal	Implementasi parsial	Tujuan kebijakan belum tercapai
5	Arah Solusi	Penguatan sumber daya	Peningkatan fasilitas & SDM	Perlu intervensi pemerintah	Kualitas layanan meningkat
		Edukasi sosial	Kampanye inklusif	Perlu peningkatan kesadaran	Mengurangi stigma
		Koordinasi lintas sektor	Integrasi program	Perlu sistem terpadu	Implementasi lebih efektif

Sumber: Analisis Peneliti, 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa hambatan implementasi pendidikan inklusif di Provinsi Banten bersifat multidimensional, mencakup aspek struktural (sumber daya), kultural (stigma sosial), dan kelembagaan (koordinasi). Data mengindikasikan bahwa keterbatasan fasilitas (<50%), kekurangan guru khusus ($\pm 60\%$), serta rendahnya kolaborasi lintas sektor (35–45%) menjadi faktor dominan yang menghambat keberhasilan kebijakan. Dampaknya, akses dan kualitas layanan pendidikan inklusif masih belum merata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu melalui penguatan sumber daya, peningkatan kesadaran sosial, serta integrasi koordinasi antar pemangku kepentingan agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

G. Dampak Implementasi terhadap Pemerataan Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Banten telah memberikan dampak positif terhadap upaya pemerataan pendidikan, namun capaian tersebut masih bersifat parsial dan belum merata di seluruh wilayah. Evaluasi dampak difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu peningkatan akses pendidikan, pengurangan kesenjangan pendidikan, serta peningkatan kualitas pembelajaran. Dari aspek peningkatan akses pendidikan, kebijakan inklusif telah membuka peluang lebih luas bagi peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) untuk mengakses layanan pendidikan formal. Data menunjukkan bahwa terdapat sekitar 85 Sekolah Dasar (SD) inklusi dan 22 SMA/SMK inklusi yang telah ditetapkan di Provinsi Banten. Keberadaan sekolah inklusi ini berkontribusi pada meningkatnya jumlah ABK yang dapat bersekolah di lingkungan pendidikan reguler. Namun demikian, dari estimasi sekitar 5.000 anak berkebutuhan khusus, hanya kurang dari 1.000 anak ($\pm 20\%$) yang telah terlayani dalam sistem pendidikan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan mengalami peningkatan, cakupannya masih terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh ABK secara optimal, terutama di wilayah perdesaan dan daerah dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan.

Pada aspek **pengurangan kesenjangan pendidikan**, implementasi pendidikan inklusif mulai menunjukkan kontribusi dalam mengurangi disparitas layanan pendidikan, khususnya antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah inklusi memberikan ruang bagi ABK untuk belajar bersama siswa lainnya, sehingga mengurangi praktik segregasi pendidikan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan masih cukup signifikan, baik dari segi distribusi sekolah inklusi maupun kualitas layanan antar wilayah. Ketimpangan terlihat dari perbedaan akses antara daerah perkotaan dan perdesaan, di mana wilayah seperti Kota Tangerang dan Kota Serang relatif lebih memiliki fasilitas pendidikan dibandingkan daerah seperti Lebak dan Pandeglang. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik menyebabkan kualitas layanan yang diterima ABK masih belum setara dengan siswa reguler. Dengan demikian, meskipun kesenjangan mulai berkurang secara konseptual, secara empiris masih terdapat disparitas yang cukup lebar.

Sementara itu, dari aspek peningkatan kualitas pembelajaran, kebijakan pendidikan inklusif mendorong perubahan pendekatan pembelajaran menjadi lebih adaptif dan berpusat pada peserta didik. Beberapa sekolah inklusi telah mulai menerapkan strategi seperti diferensiasi pembelajaran dan penyusunan *Individualized Education Program (IEP)*. Namun, implementasi ini masih terbatas, di mana hanya sekitar 25–30% sekolah yang secara konsisten menerapkan pembelajaran adaptif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kompetensi guru, di mana hanya sekitar 30–35% guru yang telah mengikuti pelatihan pendidikan inklusif. Selain itu, kurang dari 50% sekolah memiliki fasilitas pendukung pembelajaran yang memadai. Dampaknya, kualitas pembelajaran bagi ABK belum sepenuhnya optimal, dan hasil belajar yang dicapai masih bervariasi antar sekolah.

Secara keseluruhan, dampak implementasi kebijakan pendidikan inklusif terhadap pemerataan pendidikan di Provinsi Banten menunjukkan tren yang positif namun belum signifikan. Peningkatan akses pendidikan sudah mulai terlihat, tetapi masih terbatas pada sebagian kecil ABK. Pengurangan kesenjangan pendidikan juga mulai terjadi, namun belum mampu menghilangkan disparitas antar wilayah dan antar kelompok peserta didik. Sementara itu, peningkatan kualitas pembelajaran masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan kapasitas tenaga pendidik.

Tabel 6. Dampak Implementasi Pendidikan Inklusif terhadap Pemerataan Pendidikan di Provinsi Banten

No	Aspek Dampak	Indikator	Data/Temuan	Kondisi	Dampak
1	Peningkatan Akses Pendidikan	Jumlah sekolah inklusi	± 85 SD dan 22 SMA/SMK inklusi	Masih terbatas dibanding total sekolah	Akses meningkat namun belum merata
		Jumlah ABK terlayani	< 1.000 dari ± 5.000 ABK (±20%)	Mayoritas ABK belum terjangkau	Pemerataan akses belum optimal
		Sebaran wilayah	Dominan di wilayah tertentu	Tidak merata antar daerah	Akses timpang kota–desa
2	Pengurangan Kesenjangan Pendidikan	Integrasi siswa	ABK mulai belajar di sekolah reguler	Sudah mulai berjalan	Mengurangi segregasi pendidikan
		Kesenjangan wilayah	Masih tinggi (perkotaan vs perdesaan)	Disparitas masih terjadi	Pemerataan belum tercapai
		Kualitas layanan	Berbeda antar sekolah	Belum standar	Ketimpangan kualitas pendidikan
3	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Pembelajaran adaptif	± 25–30% sekolah menerapkan	Masih terbatas	Pembelajaran belum optimal
		Kompetensi guru	± 30–35% guru terlatih	Mayoritas belum kompeten	Kualitas pembelajaran rendah
		Fasilitas pembelajaran	< 50% sekolah memiliki fasilitas memadai	Infrastruktur terbatas	Dukungan belajar kurang
4	Dampak Umum Implementasi	Akses pendidikan	Mulai meningkat	Belum menjangkau semua ABK	Pemerataan parsial
		Kesenjangan pendidikan	Mulai berkurang	Masih signifikan	Ketimpangan tetap ada
		Kualitas pembelajaran	Mulai berkembang	Belum optimal	Hasil belajar belum maksimal
5	Implikasi Kebijakan	Efektivitas kebijakan	Belum optimal	Implementasi belum merata	Tujuan belum tercapai
		Kebutuhan penguatan	Tinggi	Perlu intervensi	Perbaikan sistem pendidikan inklusif

Sumber: Analisis Peneliti, 2026

Tabel ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Provinsi Banten telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses, pengurangan kesenjangan, dan kualitas pembelajaran. Namun, data memperlihatkan bahwa capaian tersebut masih terbatas, dengan hanya sekitar 20% ABK yang terlayani, rendahnya penerapan pembelajaran adaptif (25–30%), serta keterbatasan fasilitas (<50%). Oleh karena itu, dampak kebijakan masih bersifat parsial dan memerlukan penguatan lebih lanjut agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara menyeluruh.

H. Model atau Rekomendasi Implementasi Pendidikan Inklusif yang Ideal

Menyusun rekomendasi berbasis temuan penelitian untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di masa depan.



Gambar.3 Model Implementasi Pendidikan Inklusif
Sumber: Analisis Peneliti, 2026

Gambar tersebut merupakan infografik visualisasi hasil penelitian menggunakan NVIVO yang berjudul *Model Rekomendasi Implementasi Pendidikan Inklusif yang Ideal Berbasis Temuan Penelitian di Provinsi Banten*. Infografik ini menggambarkan kondisi aktual, model implementasi ideal, roadmap kebijakan, hingga dampak yang diharapkan dari penerapan pendidikan inklusif. Pada bagian kiri ditampilkan temuan penelitian terkait kondisi saat ini, yang menyoroti berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya (kurang dari 50% sekolah memiliki sarana ramah disabilitas, 60% belum memiliki Guru Pembimbing Khusus, dan hanya 30–35% guru yang terlatih), stigma sosial yang masih kuat, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Dampak dari kondisi ini adalah layanan pendidikan yang belum merata dan kualitas pembelajaran yang masih rendah.

Di bagian tengah, ditampilkan model implementasi pendidikan inklusif yang terdiri dari lima pilar utama, yaitu penguatan kebijakan dan regulasi, pengembangan sumber daya manusia pendidik, penyediaan sarana dan prasarana inklusif, sistem data, asesmen dan pemantauan, serta kolaborasi pemangku kepentingan. Kelima komponen ini saling terintegrasi dengan prinsip sinergi, kolaboratif, berbasis data, dan berkelanjutan. Sementara itu, bagian kanan menunjukkan dampak yang diharapkan, seperti meningkatnya akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus hingga minimal 60%, menurunnya kesenjangan pendidikan, serta meningkatnya kualitas pembelajaran hingga 70%.

Pada bagian bawah, infografik menyajikan roadmap implementasi kebijakan dalam tiga tahap: jangka pendek (1 tahun) yang fokus pada pemetaan data dan pelatihan dasar, jangka menengah (2–3 tahun) yang menekankan pemerataan fasilitas dan penguatan koordinasi, serta jangka panjang (4–5 tahun) yang bertujuan menciptakan sistem pendidikan inklusif yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah. Selain itu, ditampilkan pula kunci keberhasilan yang meliputi komitmen pimpinan, kolaborasi lintas sektor, investasi anggaran, peningkatan kapasitas, dan perubahan budaya menuju inklusi. Secara keseluruhan, infografik ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada sinergi dan komitmen semua pihak agar tidak ada peserta didik yang tertinggal.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Banten menunjukkan bahwa secara normatif telah tersedia kerangka regulasi yang cukup kuat untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Namun, pada tataran implementasi, kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan akses layanan pendidikan inklusif antar wilayah, keterbatasan jumlah sekolah penyelenggara, serta belum meratanya kualitas layanan yang diberikan. Faktor utama yang memengaruhi belum optimalnya implementasi kebijakan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kompetensi dan jumlah guru yang memiliki keahlian khusus, serta sistem pendataan dan identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus yang belum terintegrasi dengan baik. Selain itu, koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum maksimal serta masih adanya stigma sosial terhadap disabilitas turut menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang efektif.

Meskipun demikian, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan, seperti peningkatan pelatihan guru, penguatan kebijakan daerah, serta penyediaan fasilitas pendukung. Upaya ini mulai menunjukkan dampak positif, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, capaian tersebut masih memerlukan penguatan agar dapat memberikan dampak yang lebih merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif memiliki peran strategis dalam mendukung pemerataan pendidikan di Provinsi Banten, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya dan sistem pendukung agar implementasi kebijakan pendidikan inklusif dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi nyata terhadap terwujudnya pendidikan yang adil dan merata.

Acknowledgment

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang didukung oleh pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui program hibah penelitian skema penelitian fundamental Tahun 2026. Kami menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. C. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kota Palu. *Katalogis*, 3(1), 102–109.
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/15484>
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/viewFile/15484/11466>
- Aksela, M. (2025). Advancing Scientific Literacy in Climate Change Education through Collaborative , Evidence-Based Approaches. *Revistamultidisciplinar*, 7(3), 9–17.
- Amelia, E., & Azizah, N. (2023). Implementasi Pembelajaran Keterampilan Vokasional untuk Anak Berkebutuhan Khusus : Sebuah Tinjauan Sistematis. *Jurnal Obsesi*, 7(5), 6127–6140.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.4180>
- Anjani, I. E., Natalia, D., Suprima, S., Tarina, D. D. Y., Anam, A. K., & Lewoleba, K. K. (2023). Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Bagi Generasi Muda Demi Mewujudkan Indonesia Emas 2045. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(4), 322–331.
- Antariksa, W. F., Fattah, A., & Utami, M. A. P. (2022). Evaluasi Program Pendidikan Pesantren Mahasiswa Model Cipp (Context, Input, Process, Product). *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 75–86. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v6i1.848>
- Anwar, C., Komariyah, L., Aznem, A., Payung, L. T., & Heri, A. (2025). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia : Pendekatan CIPP dan Perspektif Keadilan Sosial. *Journal of Education Research*, 0738(3), 739–750.
- Astenia, D., Rugaiyah, & Karnati, N. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Akreditasi Sekolah/Madrasah. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.

- Bracco, J., Ciaschi, M., Gasparini, L., Marchionni, M., & Neidhöfer, G. (2024). The Impact of COVID-19 on Education in Latin America: Long-Run Implications for Poverty and Inequality. *Review of Income and Wealth*, 1. <https://doi.org/10.1111/roiw.12687>
- Coutet, K. (2022). International school accreditation: An isomorphic force against creativity in a growing competitive market. *Journal of Research in International Education*, 21(2), 105–122. <https://doi.org/10.1177/14752409221117252>
- Darodjat dan Wahyudhiana M. (2015). Model Evaluasi , Measurement, Assessment, Evaluation. *Islamadina*, XIV, 1–28.
- DiCicco, M., & Faulkner, S. A. (2024). Mutually beneficial? Middle school educators' perceptions about the benefits and challenges of a school–university partnership. *School-University Partnerships*. <https://doi.org/10.1108/sup-02-2023-0006>
- Ebekozien, A., & Aigbavboa, C. (2022). Evaluation of built environment programmes accreditation in the 21st century education system in Nigeria: stakeholders' perspective. *International Journal of Building Pathology and Adaptation*, 41(6), 102–118. <https://doi.org/10.1108/IJBPA-02-2022-0027>
- Eden, B. L. (2018). The relevance of ala accreditation: An insider's view of the ala committee on accreditation. *Advances in Librarianship*, 44A, 45–56. <https://doi.org/10.1108/S0065-28302018000044A004>
- Farawita, R. (2024). Telaah Revolusi Mental Dan Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045 Abstrak Pendahuluan Pembahasan Metode Penelitian. *Jurnal Pendas Mahakam.*, 9(3), 230–236.
- Farhan Alfikri, Nyayu Khidjah, E. S. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6).
- Fitrah, K., Kaltsum, U., & Komariyah, L. (2024). Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri Kota Sangatta dan Solusi untuk Mengatasinya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 5(2), 127–137.
- Fitriah, M., Ag, S., Pd, M., Ramli, H. B., & Si, M. (2024). Inovasi Sistem Penjamin Mutu Internal : Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Smp Satap Negeri 8 Bulukumba Smp Satap Negeri 8 Bulukumba sebagai salah satu sekolah di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki status akreditasi C dengan nilai 70 . Hal ini menunjukkan bahwa SMP SATAP Negeri 8. 01(02), 123–132.
- Frank, A., & Taylor, D. D. (2024). Building capacity in urban schools: emphasizing partnerships between counselor education and elementary schools. *School-University Partnerships*, 17(2), 170–184. <https://doi.org/10.1108/sup-11-2023-0047>
- Ira Nazliyah, dkk. (2024). Implementation of Inclusive Education Policy at Primary School in Serang City. *Refleksi Kebijakan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045*, 59–68.
- Jumanah, Nugroho, A., & Ratnasari, D. T. (2025). Connectivity of Accreditation Instrument Strengthening Policy in Realizing Excellent Primary and Secondary Education Services in Banten Province. *Manajemen Pelayanan Publik*, 09(03).
- Karimatunisa, E., & Muhtarom, T. (2024). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Journal Innovation in Education (INOVED)*, 2(3), 101–107.
- Kogoya, W., & Uruwaya, H. (2022). Pendampingan Penggunaan Iasp2020 Untuk Meningkatkan Kelayakan Akreditasi Sekolah Di Sma Yppk Asisi Sentani Tahun 2021. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(1). <https://doi.org/10.59818/jpm.v2i1.182>
- M, N., Rosbianti, R., Nur, M. A., & Hambali, M. (2024). Peran Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar. In *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 6, Issue 4, pp.

- 3260–3265). Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.6964>
- Matthew B Miles, Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- McIntyre, F. S., & Gilbert, F. W. (2021). Maintaining AACSB international accreditation: from basics to best practices. *Organization Management Journal*, 18(5), 199–209.
<https://doi.org/10.1108/OMJ-08-2021-1325>
- Mulyah, S., & Khoiri, Q. (2023). Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Inklusif. *Journal on Education*, 05(03), 8270–8280.
- Munaroh, L. N. (2024). Asesmen dalam Pendidikan : Memahami Konsep,Fungsi dan Penerapannya. *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(3), 281–297.
- Mustika Yanti, E., Wirastrri, D., Hamzar Lombok Timur, Stik., TGH Zainuddin Aryad Mamben Daya Wanasaba, J., & Timur, L. (2023). Indonesian Journal of Community Dedication. *Indonesian Journal of Community Dedication*, 5(October), 69–78.
- Nasrulloh, I., & Ismail, A. (2018). Analisis Kebutuhan Pembelajaran Berbasis Ict. *Jurnal Petik*, 3(1), 28.
<https://doi.org/10.31980/jpetik.v3i1.355>
- Nugraha, E. H. S. dan M. S. (2020). Implementasi Pengelolaan Kurikulum dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Berdasarkan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) Tahun 2020 di MTs PERSIS 37 Sumedang. *LENTERA*, 8(75), 147–154.
<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>
<https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>
<http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Park, W., & Kwon, H. (2024). Implementing artificial intelligence education for middle school technology education in Republic of Korea. *International Journal of Technology and Design Education*, 34(1), 109–135. <https://doi.org/10.1007/s10798-023-09812-2>
- Patton, M. . (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (edisi keti). Sage Publications.
- Rizki, N. J., Qomariyah, S., & Neneng, N. (2024). Peran Akreditasi Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDIT Adzkia 1 Sukabumi. In *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* (Vol. 2, Issue 3, pp. 137–152). Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda.
<https://doi.org/10.47861/khirani.v2i3.1277>
- Steven J. Taylor, Robert Bogdan, M. L. D. (2016). *Qualitative Research Methods A guidebook and Resource*. John Wiley & Sons, Inc.
- Suardipa, I. P., & Pitriani, K. (2020). Urgensi Sistem Penjaminan Mutu dan Akreditasi Dalam Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(2), 143–153.
<http://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/jurnalmutu/article/view/909>
- Suteja, J. (2024). Pendidikan Berkualitas Untuk Mempersiapkan Generasi Indonesia Emas 2045. *Senakombis*, 1, 17–23.
<https://eprosiding.embiss.com/index.php/senakombis/article/view/48>
<https://eprosiding.embiss.com/index.php/senakombis/article/download/48/3>
- Wu, W., Adylbek kyzy, G., & Liu, C. huan. (2024). The dilemma and breakthrough of practical teaching of preschool education major in Chinese colleges and universities (based on the professional accreditation perspective). *International Journal of Chinese Education*, 13(2), 1–14.
<https://doi.org/10.1177/2212585X241265569>
- Yuningsih, Y. (2019). Pendidikan Kecakapan Abada Ke 21 Untuk Mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. In *Jurnal Pedagogik Pendidikan Dasar* (Vol. 6, Issue 1, pp. 135–152). Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). <https://doi.org/10.17509/jppd.v6i1.21526>